



Sumber Berita: **RADAR TARAKAN**

TANGGAL:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
																											v			

BULAN:

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
		v									

TAHUN

2015

HALAMAN

2b

BPKRI Kaltara : Malinau Berpotensi Meraih WTP

TARAKAN – Melihat hasil laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pembkab) Malinau pada tahun-tahun sebelumnya yakni Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara) Ade Iwan Rusmana berpendapat bahwa Malinau berpotensi meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Dari laporan keuangan tahun lalu, saya berharap tahun ini WTP. Karena opini sebelumnya termasuk intensitas WDP tipis. WDP yang sudah tipis mestinya cepat. Paling maksimal tahun depan sudah WTP dan tidak memungkinkan tahun ini juga bisa," ungkapnya.

Untuk memperoleh peningkatan predikat opini, Ade pun siap melakukan diskusi terkait pelaporan pemeriksaan keuangan. Dengan harapan, setengah atau lebih Kabupaten/Kota yang ada di Kaltara dapat meraih WTP. Dan ia tak memungkiri bahwa Malinau berpotensi meraih hal tersebut.

Menurutnya, penyampaian laporan keuangan merupakan amanah dari pelaksanaan konstitusi. Bahwa, 3 bulan masa anggaran selesai, pemerintah daerah wajib menyapaikan laporan keuangan kepada BPKRI. Dan, 2 bulan setelah penerimaan BPKRI harus menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut.

"Itu yang berat bagi kami. Mengingat

tenaga auditor masih terbatas dan sebelum akhir maret, 5 daerah sudah menyerahkan laporan keuangan kepada kami," ungkapnya.

Disebutkan dari seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Kaltara, baru dua yang telah menyerahkan laporan keuangan yakni Nunukan dan Malinau. Selanjutnya, Bulungan dan Tarakan akan menyerahkan secara bersamaan dalam minggu ini. Dan yang tertinggal adalah Kabupaten Tana Tidung.

Setelah penyerahan laporan keuangan selesai, maka pihaknya pun akan membentuk 5 tim dan pertengahan april mendatang akan dilakukan pemeriksaan secara terperinci. Ade pun mengaku, penyerahan laporan keuangan ini sudah terlambat dikarenakan personel dari BPKRI sebagian besar masih di lapangan.

"Kami memohon maaf, karena kondisi yang belum memungkinkan. Sarana dan prasarana yang belum memadai. Termasuk gedung yang masih pinjam dari pemkot. Namun ruangan tidak masalah yang penting substansinya terpenuhi," kata Ade.

Untuk mengejar keterlambatan, BPKRI juga bekerjasama dengan inspektorat. Saling sharing utamanya ketika melakukan review. Agar pemahaman dan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan cepat.

"Inspektur juga paham sehingga dapat membantu personel kami di lapangan.



AGUSSALAM SANIP / RADAR TARAKAN

APRESIASI : Sebagai bentuk apresiasi, Ade Iwan Rusmana menyerahkan cenderamata kepada Bupati Malinau Yansen TP, dalam acara penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah kemarin.

Mungkin sekedar saran untuk pemda, sebelum melakukan mutasi agar pengelola keuangan ada regenerasi. Jangan seperti satu kasus, semua dimutasi. Ini sangat memberatkan dalam penyusunan laporan keuangan," imbuhnya.

Dijelaskan, pada penilaian laporan keuangan ada tiga yang dititik beratkan. Yakni akuntabilitas, transparan dan kemakmuran rakyat. Untuk saat ini yang berlangsung adalah akuntabel dan transparan. Sementara kemakmuran rakyat diwacanakan oleh ketua BPKRI Pusat, akan dibentuk satuan kinerja khusus pada 2016 mendatang.

"Jadi tolak ukur kemakmuran rakyat

adalah hasil dari rencana yang diusung bupati terpilih dan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan lainnya. Sehingga jika kepala daerah selesai, kita bisa melihat pencapaian dari visi misi kepala daerah terpilih. Itu yang diusulkan oleh ketua yang telah diputuskan dalam sidang sehingga diangkat khusus auditor kinerja," ungkapnya.

Dikatakan Ade, auditor kinerja ini tidak dilibatkan dalam pemeriksaan laporan keuangan. Namun sejak semester awal, mereka sudah mulai melakukan pemeriksaan sehingga bisa menilai kinerja masing-masing kepala daerah. (aan)